PERWUJUDAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER

Dewi Kurniasih

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia

dekur010575@yahoo.com

Abstrak

Berbagai upaya pembangunan nasional selama ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik perempuan maupun laki-laki. Namun pada kenyataannya, itu semua belum dapat memberikan manfaat yang setara bagi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan memperoleh manfaat secara optimal belum terpenuhi sehingga pembangunan nasional belum mencapai hasil yang optimal, karena masih belum memanfaatkan kapasitas sumber daya manusia secara penuh. Konsep pembangunan peranan wanita yang digunakan berkembang menjadi pemberdayaan perempuan. Namun peningkatan perempuan saja tidaklah cukup efektif dalam mewujudkan kesetaraan gender. Diperlukan adanya transformasi kekuasaan sehingga perempuan berdaya setara dengan laki-laki.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan merupakan hak asasi manusia dan merupakan prasyarat bagi terciptanya keadilan sosial, dan diperlukan dalam persamaan hak, pembangunan dan perdamaian. Kemitra-sejajaran yang terbentuk berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang diperlukan bagi pembangunan yang berkelanjutan dimana sasarannya terpusat pada manusia. Komitmen untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan, baik itu komitmen jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, namun yang penting harus berkelanjutan.

Komitmen tersebut dibutuhkan dari pihak pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah sebagai pihak yang mempunyai wewenang dan kekuasaan dalam mengatur pola berkehidupan bernegara diharapkan dalam pelaksanaan kehidupan bernegara tidak menbeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, baik itu dalam kebijakan-kebijakan maupun dalam pelaksanaan pembangunan.

Masyarakat juga dituntut untuk memiliki komitmen yang bekelanjutan untuk tidak memiliki pandangan yang membeda-bedakan antara peran laki-laki dan perempuan dalam hubungan bermasyarakat. Hal tersebut dapat tercermin dalam pola hubungan sosial, pola hubungan kemasyarakatan, adat, norma, etika, peran sosial yang berkembang dalam masyarakat. Komitmen tersebut dikenal dengan komitmen yang berfaham keadilan dan kesetaraan gender.

Di Indonesia, pembangunan sumber daya manusia dalam peningkatan status dan peranan perempuan telah lama dilakukan. Menurut sejarah hal tersebut secara nyata dilaksanakan sejak lembaga kementrian peranan wanita didirikan pada akhir tahun tujuh puluhan. Pendekatan pembangunan peranan wanita seiring dengan pendekatan pembangunan secara umum, yang dikenal dengan istilah *women in development* (WID), kemudian ada *women and development* (WAD) dan terakhir ada *gender and development* (GAD). Konsep pembangunan peranan wanita yang digunakan berkembang menjadi pemberdayaan perempuan. Namun peningkatan perempuan saja tidaklah cukup efektif dalam mewujudkan kesetaraan gender. Diperlukan adanya transformasi kekuasaan sehingga perempuan berdaya setara dengan laki-laki. Memberdayakan berarti meningkatkan kualitas perempuan mulai dari akar permasalahan sampai dengan aspek lainnya yang tentu saja dalam segala bidang.

1.2 Perumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam kegiatan ini adalah:

1. Bagaimana mengembangkan kapasitas perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Kota Cirebon?
2. Bagaimana peranan perempuan dalam pembangunan di Kota Cirebon?
3. Bagaimana kerangka strategis perwujudan keadilan dan kesetaraan gender di Kota Cirebon?

1.3 Maksud, Tujuan dan Sumber

Maksud kegiatan ini adalah untuk menyusun kerangka strategis dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Kota Cirebon. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Untuk mengembangkan kapasitas perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Kota Cirebon.
2. Untuk mendeskripsikan peranan wanita dalam pembangunan di Kota Cirebon.
3. Untuk menyusun kerangka strategis perwujudan keadilan dan kesetaraan gender di Kota Cirebon.

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1. Keadilan dan Kesetaraan Gender

2.1.1. Pengertian Gender

Gender sering diartikan dengan seks yang didefinisikan sebagai jenis kelamin yaitu pengkategorian perempuan dan laki-laki. Namun sebenarnya pengertian antara gender dan seks itu berbeda. Seks merupakan pembagian dua jenis kelamin secara biologis. Perbedaan ini sering dikatakan sebagai ketentuan dari Tuhan yang didapat secara kodrati, permanen, tidak berubah, tidak dapat dipertukarkan antara kodrat laki-laki dan perempuan. Gender merupakan pembagian sifat yang ada pada manusia, yang penentuannya didasari secara sosial maupun kultural. Sifat ini dapat dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki. Pembagian sifat pada manusia terbagi atas feminim yang identik dengan karakteristik perempuan, seperti sifat lembut dan sabar, sedangkan maskulin yang identik dengan karakteristik laki-laki mempunyai sifat yang sebaliknya dengan perempuan.

Hal tersebut sesuai dengan yang diutarakan oleh Mansour Fakih (1996) bahwasannya perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (seks) sementara gender adalah *behavioral differencess* antara laki-laki dan perempuan yang *socially contructed*. Gender merupakan perbedaan yang bukan kodrat ciptaan Tuhan namun diciptakan oleh masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) melalui proses sosial dan budaya yang panjang.

Hal serupa diungkapkan pula oleh Saparinah Sadli (1995) bahwa gender merupakan konsep sosial. Istilah feminitas dan maskulinitas dalam gender berkaitan dengan sejumlah karakteristik psikologis dan prilaku yang secara kompleks telah dipelajari seseorang malalui pengalaman sosialisasinya. Selanjutnya Saparinah Sadli (1995) juga mengungkapkan adanya kontroversi pandangan tentang hubungan antara seks dan gender yaitu antara faktor *nature-nurture* atau perdebatan antara determinisme biologis dan determinisme sosial. Contohnya seperti dominance-submission yang merupakan karakteristik biologis yang menentukan ciri agresivitas untuk laki-laki dan pasivitas untuk perempuan.

Jadi gender tersebut mengacu pada peran-peran yang dikontruksikan dan dibebankan kepada perempuan dan laki-laki oleh masyarakat. Dalam suatu organisasi maka peran-peran tadi dikontruksikan oleh budaya organisasi yang berkembang dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2005) adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal.

2.1.2. Perbedaan Gender (*Gender Diffences*)

Dalam sebuah negara pembangunan merupakan serangkaian upaya berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas dalam rangka mewujudkan tujuan nasionalnya. Pembangunan menginginkan peningkatan martabat manusia dalam segala bidang, baik materi maupun non materi. Pembangunan tersebut dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki.

Banyak pendekatan yang dilakukan terhadap peranan wanita khususnya dalam pembangunan di setiap negara, beberapa diantaranya memunculkan istilah WID (*Women in Development*), WAD (*Women and Development*) dan GAD (G*ender and Development*). Ungkapan WID merupakan ungkapan pemikiran pertama mengenai peran perempuan dalam pembangunan. Istilah WID diciptakan pada awal tahun 1970-an oleh *Women's Committee of the Washington D.C.* Sejak itu WID digunakan sebagai pendekatan terhadap isu perempuan dan pembangunan yang sebagian besar didasarkan pada paradigma modernisasi dan industrialisasi. Pendekatan WID difokuskan kepada inisiatif seperti pengembangan teknologi yang lebih baik, tepat dan yang akan meringankan beban kerja perempuan. Tujuan WID benar-benar menekankan sisi produktif kerja dan tenaga perempuan dengan mengabaikan sisi reproduksinya.

WAD merupakan satu pendekatan feminis neo-Marxis, yang muncul pada paruh terakhir 1970-an yang berasal dari kepedulian terhadap keterbatasan teori modernisasi. WAD menunjukkan bahwa perempuan penuan penting secara ekonomi dan kerja yang dilakukannya dalam rumah tangga dan komunitasnya sangat mendasar untuk mempertahankan masyarakat mereka. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa posisi perempuan akan lebih baik selama dan ketika struktur internasional menjadi lebih adil, tetapi pendekatan ini cenderung menitikberatkan kepada kegiatan yang mendatangkan pendapatan dan kurang mengindahkan tenaga perempuan yang disumbangkan dalam mempertahankan keluarga dan rumah tangga.

2.2. Perempuan Dalam Pembangunan (*Women in Development*)

Konsep ini menjelaskan bahwa perbedaan yang terdapat pada laki-laki dan perempuan tidak saja didasarkan pada perbedaan biologis tetapi juga pada perbedaan yang didasarkan oleh bentukan budaya. Lebih lanjut, untuk mempertegas perjelasan tersebut, dalam Buku 02 Bunga Rampai Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan Nasional (2003 : 13) dinyatakan bahwa:

> Pada hakekatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki. Keduanya diciptakan berbeda agar bisa saling melengkapi guna membangun suatu kekuatan (sinergi) baru yang lebih kuat dan bermanfaat bagi kehidupan. Dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi dominasi oleh satu pihak dengan pihak yang lain sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Secara statistik pada umumnya kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan. Situasi ini merupakan hasil akumulasi dan akses dari nilai sosio-kultural suatu masyarakat.

Istilah gender diketengahkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan mana perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan. Pembedaan ini sangat penting karena selama ini kita sering mencampuradukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan tidak berubah dengan ciri-ciri manusia yang bersifat non kodrati (gender) yang sebenarnya bisa berubah atau diubah. Pembedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada perempuan dan laki-laki.

Soepangat (1994:4) menyatakan bahwa:

> Peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari hubungan yang dilandasi gender. Dalam konteks sosiologis, gender didefinisikan sebagai perbedaan sifat perempuan dan laki-laki yang tidak hanya mengacu pada perbedaan biologis tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial budaya sehingga menimbulkan nilai-nilai lain yang berlanjut menjadi nilai umum terhadap kelompok jenis tertentu. Konsep ini lebih memberikan kemungkinan pembagian kerja yang lebih luas bagi perempuan dan laki-laki.

Usaha yang lebih menekankan pada pemberdayaan dan perubahan struktur gender ini dikenal dengan pendekatan Gender and Development (GAD). Sejalan dengan hal itu, Mosse (1996 :209) menyatakan bahwa:

> Salah satu pendekatan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan (kerja produktif, reproduktif, privat dan publik) dan menolak upaya apa pun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, agar pemberdayaan perempuan dapat dicapai melalui program yang tumbuh dari bawah (*bottom up*) maka yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat berdasarkan gender. Identifikasi kebutuhan berdasarkan gender ini dilakukan untuk melihat keadaan obyektif perempuan dan laki-laki dalam suatu masyarakat. Menurut Moser yang dikutip dalam Ashari (1998:38-39) menyatakan:

> Ada dua macam kebutuhan gender yang dapat diidentifikasi yaitu kebutuhan yang bersifat praktis dan kebutuhan yang bersifat strategis. Kebutuhan praktis adalah kebutuhan yang dirumuskan dari kondisi konkrit pengalaman perempuan yang berkaitan dengan posisi gender dalam pembagian kerja secara seksual untuk kelangsungan hidup manusia. Sedangkan, kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan yang dirumuskan dari analisis yang diidentifikasi untuk mencapai suatu alternatif kelembagaan masyarakat, baik dilihat dari struktur maupun hubungan perempuan dan laki-laki.

Strategi pemberdayaan perempuan, sesungguhnya bukan bermaksud menciptakan perempuan lebih unggul dari laki-laki, namun berupaya untuk mengidentifikasikan kekuasaan dalam kerangka dominasi dan kapasitas perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Moser, berkaitan dengan gender, dalam hal ini kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, maka Sadli (2000:8) mengemukakan bahwa:

> Kesetaraan gender tidak berarti bahwa perempuan harus menjadi sama dengan laki-laki. Kesetaraan gender berarti bahwa kesempatan dan hak-haknya tidak bergantung kepada apakah ia (secara biologis) perempuan atau laki-laki. Kesetaraan gender perlu difahami dalam arti bahwa perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama; berada dalam kondisi dan mendapat kesempatan yang sama untuk merealisasikan potensinya sebagai hak-hak asasinya, sehingga perempuan dapat menyumbang secara optimal pada pembangunan politik, ekonomi, sosoal, budaya dan mempunyai kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan.

Perempuan diharapkan dapat menentukan pilihan dalam kehidupan dan mempengaruhi arah perubahan untuk melakukan kontrol sumber daya materiil dan memberikan kekuasaan melalui pendistribusian di dalam dan di antara masyarakat. Pada hakekatnya, sasaran program pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan.

2.2.1. Peningkatan Peran Perempuan Dalam Era Globalisasi

Melibatkan perempuan dalam proses pembangunan bukanlah berarti hanya sebagai suatu tindakan perikemanusiaan belaka. Tindakan ini berupa mengajak dan mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pembangunan menyeluruh yang dilaksanakan sekarang ini memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut serta secara maksimal dalam setiap kegiatan pembangunan tanpa mengurangi perannya dalam keluarga. Perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan manajemen. Peran perempuan dalam pembangunan perlu diperhatikan tidak hanya dari segi keberadaannya saja tetapi juga kualitas perannya.

Dalam pembangunan pedesaan, Sayogyo (1986 :1) menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan amat diharapkan. Tindakan mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan merupakan suatu tindakan efisien.

Pemberdayaan perempuan, berdasarkan Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan adalah serangkaian upaya-upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi sebagai pelaku dalam pengelolaan pembangunan, memutuskan serta kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial dan budaya agar perempuan dapat mengatur dirinya sendiri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan serta dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Selain itu, perempuan di Indonesia menurut Pabeta (1993 :3), disamping melakukan pekerjaan rumah tangga dan pencarian nafkah, juga memiliki aktivitas di luar rumah yang merupakan cerminan peranannya di berbagai bidang. Aktivitas perempuan di luar rumah sangat erat kaitannya dengan keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan lembaga kemasyarakatan. Terlibatnya perempuan dalam berbagai kegiatan di luar rumah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan menyebabkan berbagai dampak yang terjadi dalam masyarakat. Salah satunya yaitu meningkatkan eksistensi perempuan itu sendiri.

Kata "globalisasi" diambil dari kata *global*, yang maknanya ialah *universal*. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (*working definition*), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

Globalisasi dalam bidang tenaga kerja dapat dimaknai bahwa perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka *human movement* akan semakin mudah dan bebas tanpa membeda-bedakan manusia berdasarkan jenis kelaminnya..

Wanita Indonesia tidak bisa dilihat sebagai suatu entitas sendiri terpisah dari entitas wanita secara global. Membahas wanita dan globalisasi dalam konteks *Human Recource Planning (HRP),* setidaknya terdapat tiga variabel yang dapat dimaknai, yaitu:. *Pertama,* eksistensi wanita sebagai salah satu bagian dari angkatan kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus mendapatkan pemberdayaan dalam konteks *Strategic HRM (Human Resource Management) Planning. Kedua,* globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, komunikasi, perjalanan, budaya popular, dan bentu-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu Negara menjadi bias atau berkurangnya peran Negara atas batas-batas Negara tersebut.

2.2.2. Data Faktual Perempuan

Secara keseluruhan indeks kualitas hidup manusia digambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index/*HDI) yang berada pada peringkat ke-96 pada tahun 1995 yang kemudian menurun ke peringkat 109 pada tahun 1998 dari 174 negara. Tahun 1999 berada pada peringkat 102 dari 162 negara dan tahun 2002, 110 dari 173 negara. Berdasarkan Human Development Report 2003, HDI Indonesia menempati urutan ke-112 dari 175 negara, dibandingkan Negara-negara ASEAN lainnya seperti HDI Malaysia, Thailand, Philippina yang menempati urutan 59, 70 dan 77.

Sedangkan *Gender related Development Index* (GDI) berada pada peringkat ke-88 pada tahun 1995, kemudian menurun ke peringkat 90 (1998) dan peringkat 92 (1999 dari 146 negara). Kemudian pada tahun 2002 pada peringkat 91 dari 144 negara GDI inipun masih tertinggal dibandingkan dengan-negara di ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Philippina yang masing-masing berada pada peringkat 54, 60, 63. Berdasarkan hasil Survey Penduduk 2000 (BPS) diketahui jumlah penduduk Indonesia sebesar 206.264.595 orang. Jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan, (50,1% diantaranya laki-laki dan 49,9% perempuan). Sedangkan untuk Kota Cirebon jumlah penduduknya sebanyak 290.450 dengan perempuan sebanyak 147.737 (Kota Cirebon Dalam Angka 2008). Ini berarti setengah jumlah penduduk Kota Cirebon adalah perempuan. Indeks pembangunan manusia skala internasional dan nasional dilihat dari tiga aspek yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kondisi dan posisi perempuan meliputi 3 (tiga) aspek tersebut di atas sebagai berikut:

a. Pendidikan.Di bidang pendidikan, kaum perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Kondisi ini antara lain disebabkan adanya pandangan dalam masyarakat yang mengutamakan

dan mendahulukan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan daripada perempuan. Ketertinggalan perempuan dalam bidang pendidikan tercermin dari presentase perempuan buta huruf (14,54% tahun 2001) lebih besar dibandingkan laki-laki (6,87%), dengan kecenderungan meningkat selama tahun 1999-2000. Tetapi pada tahun 2002 terjadi penurunan angka buta huruf yang cukup signifikan. Namun angka buta huruf perempuan tetap lebih besar dari laki-laki, khususnya perempuan kepala rumah tangga. Angka buta huruf perempuan pada kelompok 10 tahun ke atas secara nasional (2002) sebesar 9,29% dengan komposisi laki-laki 5,85% dan perempuan 12,69% (Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 1999-2002).Menurut Satatistik Kesejahteraan Rakyat 2003. Angka buta huruf perempuan 12,28% sedangkan laki-laki 5,84%.2.

b. Kesehatan. Menurut *Gender Statistics and Indicators* 2000 (BPS), kemajuan di bidang kesehatan ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian bayi (dari 49 bayi per 1000 kelahiran pada tahun 1998 menjadi 36 tahun 2000, (Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 1999-2001). Menurunnya angka kematian anak serta meningkatnya angka harapan hidup dari 64,8 tahun (1998) menjadi 67,9 tahun (2000), Berdasarkan estimasi parameter demografi 1998 yang dikeluarkan BPS, angka harapan hidup (eo) pada periode 1998-2000 cenderung meningkat. Usia harapan hidup (life expectancy rate) perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 69,7 tahun berbanding 65,9 tahun. (Sumber: BPS, Estimasi Parameter Demografi, 1998).Dibidang kesehatan, selama periode 1998-2000 ada penurunan angka kematian bayi, Infant Mortality Rate (IMR).
c. Ekonomi. Di bidang ekonomi, secara umum partisipasi perempuan masih rendah, kemampuan perempuan memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah, demikian juga dengan akses terhadap sumber daya ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu 45% (2002) sedangkan laki-laki 75,34%, (Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 1999-2002). Sedangkan ditahun 2003 TPAK laki-laki lebih besar dibanding TPAK perempuan yakni 76,12% berbanding 44,81%. (BPS, Statistik Kesejahteraan Rakya, 2003).
d. Kesenjangan dibidang hukum dan politik. Faktor penyebab kesenjangan kondisi dan posisi perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang bias gender karena dalam bidang hukum masih banyak dijumpai substansi, struktur, dan budaya hukum yang diskriminatif gender. Jumlah peraturan perundang-undangan yang diskrimintaif terhadap perempuan berjumlah kurang lebih 32 buah.

   Kondisi di Kota Cirebon tidak jauh berbeda, menurut Kota Cirebon Dalam Angka 2008, jumlah anggota DPRD Kota Cirebon 30 orang dan hanya 2 orang yang perempuan. Sedangkan jumlah PNS Kota Cirebon sebesar 48 % merupakan perempuan dan 62 % laki-laki.

3. PEMBAHASAN

Presiden RI telah mengintruksikan kepada lembaga tertinggi negara, sipil dan militer, departemen serta non departemen, kepala wilayah daerah di setiap tingkatan untuk melaksanakan pengarusutaman gender (PUG). Hal ini dikukuhkan dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 9 tahun 2000 2000 yang mengatur adanya kebijaksanaan pengarusutaman gender di Indonesia. Pemberdayaan perempuan di Kota Cirebon adalah serangkaian upaya-upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh kesejahteraan, kesempatan, berpartisipasi sebagai pelaku pengolah pembangunan, memutuskan serta kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya.

Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kota Cirebon diharapkan adanya peran serta dari seluruh lapisan masyarakat terutama dinas instansi terkait, agar mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada, baik di tatanan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat.

Pengarusutamaan gender adalah suatu strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender untuk mewujudkan kondisi yang demikian, diperlukan langkah-langkah menghentikan ketidakadilan sosial yang timbul dalam sejarah, yang menghambat perempuan dan laki-laki untuk setara, dan dapat berperan serta menikmati hasil dari perannya. Posisi Kota Cirebon berdasarkan data statistik pusat yaitu: Indeks Pembangunan Manusia ranking 56 dari 440, Indeks Pembangunan Gender ranking 118, Indeks Pemberdayaan Gender ranking 232 dari 440 Kabupaten/Kota.

Sasaran dan program pemberdayaan perempuan di Kota Cirebon diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada perempuan, yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki, terhadap sumber daya pembangunan.

GBHN mengamanatkan agar bangsa ini meningkatkan peran dan kedudukan kaum perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta meningkatkan kemandirian dan kemampuan organisasi wanita. Perlu diacungi jempol bahwa untuk mewujudkan usaha pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) pemerintah secara serius telah mengadakan berbagai pelatihan ditingkat kabupaten/kota. Di Kota Cirebon sendiri telah dilaksanakan pelatihan pengarusutamaan gender bagi guru-guru dan organisasi wanita dari tanggal 7 sampai 10 Juli 2008 yang diselenggarakan oleh Kantor KB-PP Kota Cirebon. Dengan pelatihan itu diharapkan adanya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender disegala bidang.

Dalam upaya menjabarkan kesetaraan dan keadilan gender, dilakukan pembentukan forum komunikasi, konsultasi dan koordinasi Gender Kota Cirebon merupakan tindak lanjut terhadap fenomena kekerasan khususnya yang berada di Kota Cirebon. Fenomena kekerasan merupakan persoalan bangsa yang harus dicarikan solusinya terutama kekerasan terhadap perempuan. Apalagi sekitar separuh penduduk Indonesia adalah perempuan yang memberikan arti bahwa kondisi perempuan di Indonesia merupakan salah satu indikator atau cerminan dari sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan indeks kualitas hidup di Indonesia digambarkan melalui *Human Development Index (HDI)* yang masih rendah dan tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Masih rendahnya kualitas sumber daya perempuan inilah salah satunya berakibat pada seringnya perempuan dijadikan korban kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia merupakan silet pandemic yang belum ada perhatian dari institusi terkait, baik kepolisian, kejaksaan, maupun Pengadilan. Namun dalam kenyataan bahwa kekerasan tersebut tidak hanya terjadi pada lingkungan yang kurang berpendidikan. Menurut data berbagai lembaga memperlihatkan, perempuan korban memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Cukup banyak perempuan korban yang berpendidikan tinggi.

Permpuan korban kekerasan tersebut memerlukan tidak hanya layanan medis dan bantuan hukum untuk memulihkan, namun juga sangat membutuhkan layanan psikologis serta dukungan sosial dan sikap empati dari masyarakat untuk benar-benar mampu kembali berdaya. Dalam hal ini korban kekerasan tidak hanya pada kaum perempuan. Kita sering melihat pada berbagai media baik televisi dan media massa, anak-anak baik anak laki-laki ataupun perempuan pun menjadi korban kekerasan. Kejadian tersebut sering terungkap pada pemerkosaan anak, sodomi anak, penjualan anak. Baru-baru ini diberitakan baik di mass media dan televisi terjadi perlakuan sodomi pada 11 anak di kelurahan Drajat – Cirebon.

Selain itu Pemerintah Kota Cirebon juga telah melakukan Pelatihan Analisis Gender dan Gender Budget Tingkat Kota Cirebon sebanyak 40 orang perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Pelatihan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan peran perempuan dalan setiap struktur organisasi, khususnya di lingkungan pemerintah. Selama ini dirasakan peran perempuan dalam struktur pemerintahan masih sangat rendah, terbukti dari masih banyaknya pengelolaan keuangan yang dipegang laki-laki. Untuk *bugeting* atau masalah keuangan, wanita harus tahu, yang selama ini sektor tersebut yang notabene cocok bagi kaum perempuan saat ini justru masih banyak dipegang laki-laki. Diharapkan dengan pelatihan ini kaum perempuan akan lebih paham dalam mengelola keuangan.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa permasalahan yang terkait dengan gender :

1) Permasalahan dan dampak kesenjangan gender. Permasalahan mendasar dalam pembangunan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersuami dari ketimpangan struktur sosio kultural masyarakat yang diwarnai perselisihan terjemahan ajaran agama yang bias gender.

   Dalam konteks sosial, kesenjangan ini tercermin dalam masih terbatasnya akses sebagain besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, terbatasnya kesempatan mengikuti pendidikan yang mengakibatkan rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas, serta rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak.

   Selain dari ketidakadilan gender terlihat pada tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindakan kekerasan perempuan dan anak merupakan salah satu pelanggaran HAM

meskipun telah banyak upaya dilakukan pemerintah seperti menyusun rencana aksi nasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan (RAN-PTKP), penyebaran informasi dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

Masalah lainnya, rendahnya kesejahteraan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan era desentralisasi, timbul masalah kelembagaan dan jaringan di daerah, provinsi dan kabupaten/kota terutama yang menangani masalah pemberdayaan perempuan dan anak

Masalah lainnya adalah belum tersedianya data pembangunan yang terpilih memuat jenis kelamin, sehingga masih dalam menemukan masalah-masalah perda yang ada. Partisipasi masyarakat belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan mengingkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Jadi kalau di cermati dengan seksama, permasalahan gender bermula dari permasalahan relasi gender yang tidak seimbang dan merugikan salah satu pihak, maka dampak dari kesenjangan gender tersebut, kelihatan pada kehidupan keluarga. Yaitu :

a. Adanya bias gender dalam bidang pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja serta ekonomi yang berakibat ketertinggalan kaum perempuan dibandingkan dengan kaum laki-laki.
b. Meningkatnya aktivitas *traffieking,* yang sebagian besar merugikan perempuan dan anak-anak.
c. Meningkatnya frekuensi *domestic violence* atau kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar menimpa kaum perempuan dan anak.
d. Pengarusutamaam bias gender yang lebih mengembangkan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan.
e. Masalah sosial kultural dan pantangan ajaran agama. Akar permasalahnya berasal dari kesenjangan sosiologis kultural ditingkat keluarga dan masyarakat lokal atau adanya marjinalisasi, ketidakadilan dalam pemberian peran. Pelebelan pada kaum perempuan, beban ganda pada perempuan, penyalahgunaan arti dari pengertian kodrati untuk memagari kaum permpuan agar tidak mudah banyak berpartisipasi disektor publik.

Dampak dari kesenjangan gender ditingkat keluarga akan meluas ketingkat makro dengan kenyataan, bahwa bangsa Indonesia masih mengalami kualitas HDI yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang terlambat, kualitas pendidikan rendah (APS, APK, APM rendah, angka buta aksara tinggi), kualitas kesehatan rendah (AKI/AKB tinggi), masalah sosial yang tinggi (penganguran, kriminalitas, *traffickin*g, kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat rendah atau kemiskinan struktural meningkat dan regenaeratif, kualitas pemeliharaan lingkungan rendah atau kerusakan hutan dan erosi serta polusi yang tinggi), transfer ketidakadilan dari generasi ke generasi konstan atau meningkat, urbanisasi atau emigrasi yang tinggi.

Permasalahan ini dikaji melaui pengkajian referensi, RPJMN, RPJM daerah propinsi jawa barat, RPJM kota cirebon. Pada akhirnya nanti akan dikaji ulang untuk penyusunan kerangka strategis perwujudan keadilan dan kesetaraan gender kota cirebon.

2) Cara Mengatasi Masalah.

Untuk mengatasi permasalahan yang telah dipaparkan di atas:

a. Perlu pemahaman dan kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat dan juga seluruh aparatur negara didalam memahami akar permasalahan. Untuk itu perlu perubahan mindset dalam permohonan konsep gender dan pentingnya peran gender dalam pembangunan suatu negara hukum dimulai dari sekarang.
b. Didalam menanggulangi kesenjangan gender yang sudah berabad-abad dimasyarakat, perlu dilakukan interfensi pihak pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pemasalahan gender dan anak (Puga) ditingkat nasional dan propinsi/kota melalui berbagai program dan kegiatan yang bersinergis antar stekeholder diberbagai jenjang pemerintahan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG), mulai dari tingkat keluarga, masyarakat dan negara dengan memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan.

3) Sasaran (RPJMN 2004-2009)

sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak adalah:

a. Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan dan kebijakan publik

b. Menurunnya kesenjangan pencapai pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang diukur oleh angka GDI dan GEM.
c. Menurunnya tindak kekerasan tehadap perempuan dan anak, serta
d. Menigkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak (RPJMN 2004-2009) dalam pencapaian sasaran ini perlu dikaji dan disesuaikan dengan kemauan, kemampuan dan kondisi daerah khususnya kota Cirebon.

4) Arah Kebijakan Pembangunan

Sejalan dengan RPJP daerah propinsi Jawa Barat (2005-2025), peraturan daerah propinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2008, tentang arah pembangunan untuk aspek pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Upaya pembangunan diarahkan :

a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan
b. Perumusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
c. Ketersediaan data dan statistik dan informasi
d. Peningkatan kelembagaan dan jaringan pengaruh utama gender (PUG)

1) Keadaan perempuan di Kota Cirebon dalam keterlibatannya dipolitik dapat dilihat dari ”Cirebon Dalam Angka 2008” yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Cirebon. Dalam data telihat bahwa keterlibatan perempuan yang menjadi anggota legislatif itu sangat minim, hanya 2 orang dari seluruh jumlah anggota yang berjumlah 30 orang. Ini berarti perempuan hanya berkisar 6 % saja yang ada di DPRD, padahal seharusnya minimal 30 %. Data ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel
Persentase Anggota DPRD menurut Jenis Kelamin Tahun 2007

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki-Laki	28	94
Perempuan	2	6
Jumlah	**30**	**100**

Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka 2008, diolah.

Kondisi ini menunjukan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD belum maksimal. Untuk itu diharapkan bahwa meskipun jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD minim namun diharapkan agar anggota DPRD lain mamiliki pandangan yang tidak bias gender atau memiliki pandangan yang berwawasan gender. Sehingga aspirasi dan isu-isu mengenai kesetaraan gender tetap diperhatikan.

6) Keadaan perempuan di Kota Cirebon dalam keterlibatannya dipemerintahan dapat dilihat dari ”Cirebon Dalam Angka 2008” yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Cirebon. Dalam data tersebut terlihat jumlah perempuan yang menjadi aparat pemerintahan jumlahnya mencapai 48 % dari jumlah keseluruhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel
Persentase PNS di Lingkungan Pemerintahan Kota Cirebon
Dirinci menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin Tahun 2007

No	Unit Kerja	Perempuan		Laki-laki	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Setda Kota	71	28	182	72
2.	DPRD dan Sekretariat KPU	8	26	22	74
3.	Dinas-Dinas	2.484	52	2.256	48
4.	Kantor	58	22	197	78
5.	Badan/Lembaga	508	49	520	51
6.	Kecamatan/Kelurahan	92	24	281	76
7.	Perusahaan Daerah	-	0	2	100
Jumlah		**3.219**		**3.460**	

Sumber: Kota Cirebon Dalam Angka 2008, diolah.

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, yaitu menjadi aparat pemerintahan, jumlahnya hampir sebanding dengan jumlah laki-laki. Terutama

PNS di dinas-dinas. Kondisi ini menunjukan bahwa perempuan yang bekerja disektor publik yang menjadi aparat pemerintahan mempunyai peranan yang besar. Diharapkan hal tersebut dapat berimbang dengan kualitas kerja yang dihasilkan. Ini merupakan wadah untuk membuktikan bahwa walaupun perempuan bekerja itu mempunyai tugas domestik/tugas rumah tangga, namun dalam pelaksanaan tugas-tugas publiknya menjadi aparat pemerintahan tetap terlaksana dengan maksimal.

7) Pengaruh dari ajaran agama Islam, yang merupakan agama mayoritas yang dianut masyarakat Kota Cirebon, menjadikan perempuan dianggap tidak diperkenankan untuk berada pada ranah publik/diluar rumah, bahkan menjadi pemimpin. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya beberapa pemahaman tafsiran al Qur'an, yang merupakan kitab suci Agama Islam, yang berbeda yang berkaitan dengan persoalan gender. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mansour Faqih (1996) bahwa adanya subordinasi perempuan tidak sesuai dengan semangat keadilan yang diangungkan Islam. Pada dasarnya Agama Islam, sebagaimana dalam al Qur'an, mempunyai semangat hubungan laki-laki dan perempuan yang bersifat adil (*equal)*. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Hujarat ayat 14 yang artinya Sesungguhnya telah Aku ciptakan kalian laki-laki dan perempuan dan Aku jadikan kalian berbangsa dan bersuku-suku agar kalian lebih saling mengenal; sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian adalah yang paling takwa.

   Hak perempuan dan laki-laki dalam Islam adalah sama. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan perintah agama. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Mukmin ayat 40 yang artinya Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka ia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Barang siapa mengerjakan amal yang shalih, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rizeki tanpa hisab.

   Sebenarnya tidak ada ayat yang secara ekspilsit menjelaskan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di masyarakat namun hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan persepsi dari tafsiran al-Qur'an dan juga karena adanya budaya yang telah menciptakan subordinasi bagi kedudukan perempuan di masyarakat.

   Ini menciptakan terjadinya bias gender. Ketidakjelasan mengenai kedudukan perempuan tersebut pada akhirnya merugikan kaum perempuan. Ketidak-jelasan mengenai boleh tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat telah membuat langkah perempuan yang memiliki kemampuan dan potensi mengalami hambatan.

   Untuk itu perlu dilakukan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat terutama kaum pemuka Agama Islam di Cirebon agar tidak terjadi bias gender di masyarakat dalam kehidupan beragama.

Saat ini gender masih menjadi isu sentral yang kerap dibicarakan. Kekeliruan dalam memahami dan mengartikan istilah gender masih sering terjadi. Dalam bahasa Inggris, kata gender diartikan sebagai "jenis kelamin",atau sinonim dengan kata *sex*. Untuk konsep yang lebih luas, gender diartikan sebagai "*gender is a basis for beginning the different contributions that man and woman make to culture and collective life by distinction which they are as man and woman*." Seseorang menjadi maskulin atau feminin bagaikan gabungan blok-blok bangunan biologis dan interpretasi biologis oleh kultur masyarakat di mana seseorang berada. Dan setiap masyarakat memiliki berbagai naskah (*scripts*) untuk diikuti oleh anggotanya untuk belajar memainkan peran feminim atau maskulin.

Sementara *sex* atau jenis kelamin diartikan sebagai sifat dua jenis kelamin manusia yang telah ditentukan secara biologis. Misalnya, laki-laki adalah manusia yang mempunyai penis, memiliki *jakala* (kala menjing) dan memproduksi sperma. Sementara perempuan mempunyai alat-alat reproduksi seperti rahim, indung telur, vagina dan sebagainya. Organ-organ biologis yang dimiliki oleh kedua jenis makhluk tersebut akan melekat selamanya, bersifat permanen, tidak berubah, bersifat ketentuan Tuhan dan karenanya disebut kodrat (*nature*).

Pemahaman lain dari gender adalah bahwa ia merupakan sifat yang melekat pada kaum laki–laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, keibuan, emosional dan sebagainya, sementara laki–laki kuat, rasional, jantan dan perkasa. Di sini ada variabel yang mempunyai peran sangat signifikan, yaitu konstruksi, baik secara sosial maupun kultural. Dengan demikian gender juga merupakan konsep

kultur yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki–laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, kami menyimpulkan sebagai berikut:

1. Persoalan kesetaraan dan keadilan gender merupakan hal yang seakan-akan tidak terselesaikan. Untuk perlu dilakukan interfensi pihak pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pemasalahan gender dan anak (Puga) ditingkat nasional dan propinsi/kota melalui berbagai program dan kegiatan yang bersinergis antar stekeholder diberbagai jenjang pemerintahan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG), mulai dari tingkat keluarga, masyarakat dan negara dengan memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan.
2. Secara umum partisipasi perempuan di Kota Cirebon menunjukan jumlah yang signifikan. Perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki yang menjadi PNS hampir sama. Ini menujukan bahwa kaum perempuan di Kota Cirebon telah *eksis* secara nyata. Meskipun keterlibatan dalam bidang politik melalui keanggotaannya dalam DPRD masih sangat minim.
3. Kota Cirebon sebagai kota yang kuat Ajaran Islamnya menjadikan posisi posisi permpuan sulit karena sering terjadi bias gender. Ini terjadi karena adanya pemahaman yang berbeda menganai ajaran Agama Islam dalam menyikapi perempuan bekerja diluar rumah. Ketidakjelasan mengenai kedudukan perempuan tersebut pada akhirnya merugikan kaum perempuan. Ketidak-jelasan mengenai boleh tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat telah membuat langkah perempuan yang memiliki kemampuan dan potensi mengalami hambatan.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, kami merekomendasikan:

1. Perlu pemahaman dan kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat dan juga seluruh aparatur negara didalam memahami akar permasalahan. Untuk itu perlu perubahan mindset dalam permohonan konsep gender dan pentingnya peran gender dalam pembangunan suatu negara hukum dimulai dari sekarang.
2. Perlu adanya kerjasama dari semua pihak dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender ini, termasuk dari kaum peremouannya itu sendiri. Bagi perempuan yang berpartisipasi dalam sektor publik dimasyarakat perlu selalu dapat membuktikan dirinya mempunyai kemampuan. Sehingga pelabelan kualitas perempuan yang rendah dapat dihindari. Beban ganda yang miliki kaum perempuan bekerja tidak kemudian menjadikan kulitas kerjanya menurun.
3. Untuk mengatasi keterbatasan gerak perempuan diluar rumah karena pemahaman Agama Islam, perlu adanya pendekatan-pendekatan secara intens dari pihak-pihak terkait terhadap kaum pemuka Agama Islam di Kota Cirebon melalui kunjungan, forum dialog, diskusi dan lain-lain. Ini dilakukan agar tidak terjadi bias gender di masyarakat dalam kehidupan beragama.
4. Sebagai pemikiran, perlu adanya badan advokasi bagi penyelesaian masalah ketimpangan gender dan tindak kekerasan serta perdagangan anak. Badan ini dapat sebagai mediator membantu penyelesaian berbagai masalah ketidakadilan gender dan perlindungan terhadap tindak kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdullah, Irwan. (1997). *Sangkan Paran Gender*. Pustaka Pelajar:Yogyakarta.

Ahmed, Laela, *Islam dan Gender*, terj. MS Nasrullah, Lentera, Jakarta, 2000.

_____, *Wanita Dan Gender Dalam Islam Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, Lentera, Jakarta, 1992.

Ashari. 1998. *Pola Partisipasi Wanita Transmigran Dalam Pembangunan*. Tesis. Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Bern, Sandra L., *The Lenses of Gender: Transforming the Debate on Sexual Inequality*, Yale University Press, New Haven, 1993.

Budiman A.1985. *Pembagian Kerja Seksual*. Jakarta: Gramedia.

Christian Tradition and Women's Experience, Harper & Row, San Fransisco, 1990.

Luhulima, Achie Sudarti. 2000. *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. 2000. Ihromi, T. O, Sulistyowati Irianto, Achie Sudarti L (Penyunting). Bandung. Penerbit Alumni.

Mosse, Julia Cleves. 1996. *Gender Dan Pembangunan*. Jakarta:Pustaka Pelajar.

Nugroho, Riant. (2008). *Gender dan strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*. Pustaka Pelajar:Yogyakarta.

Rahayu, Budi, Indah. 2006. *Dampak Pembagian Kerja Gender Pada Istri Pasangan Penyandang Cacat.* Jakarta: Jurnal Departemen Pemberdayaan Perempuan.

Rahimi, Saidah dkk., "Pendidikan Ketrampilan Sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan (Studi Tentang Model Alternatif Bagi Santriwati Di Pondok Pesantren Kota Cirebon)", Dalam *Jurnal Pengkajian & Penelitian Gender Equalita*, Psw Cirebon, Vol. I, No. 1, Desember 2001.

Reinharz, Shulamit. (1992) *Metode-metode Feminis dalam Penelitian Sosial*. Women Research Institute:USA.

_____. 2000. *Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.* Dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. 2000. Ihromi, T. O, Sulistyowati Irianto, Achie Sudarti L (Penyunting). Bandung. Penerbit Alumni.

Saptari R, 1997, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial.* Jakarta : Grafiti.

Sastriyani, Siti H. (2009). *Gender and Politics*. Tiara Wacana:Yogyakarta.

Sayogyo, Pudjiwati. 1986. *Pola Kerja Wanita Pedesaan dalam Pembangunan*. Bogor : Lembaga Penelitian IPB.

_____. 1981. *Peranan Wanita dalam Keluarga, Rumah Tangga dan Masyarakat yang Lebih Luas di Pedesaan di Jawa : Dua Kasus Penelitian di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Sumedang di Jawa Barat*. Disertasi. Universitas Indonesia.

Showalter (ed.), *Elaine Speaking Of Gender*, Routledge, New York and London, 1989.

Soepangat, Parwati. 1994. *Gender dan Ketahanan Keluarga*. Makalah. Disajikan Dalam Penataran Istri Susreg XXI Sesko ABRI 10 Desember 1994 di Sesko ABRI. Bandung.

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian Study Bias Gender Dalam Al-Quran, LKiS*, Yogyakarta,1999.

Wilson, Ht., *Sex And Gender, Making Cultural Sense Of Civilization,* E.J. Brill, New York, 1989.

Sumber Lain:

BPS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, JICA dan UNFPA, Buku Referensi Pelatihan: Fakta dan Indikator Gender, Tingkat Nasional, 4 Propinsi dan 16 Kabupaten/Kota Terpilih, 2003.

BPS. *United Nations Development Fund for Women*. Gender Statistics and Indicators 2000.

BPS Kota Cirebon. *Kota Cirebon Dalam Anggka 2008.*

RPJMD Kota Cirebon 2009.

Media Wanita dan Pembangunan, 1999, Edisi 5

Keputusan Presiden RI No 9 Tahun 2000. *Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan* 2000-2004. Jakarta.

Lembaga Penelitian Perempuan. 2002. *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah.* www.wri.or.id/penelitian/index.php